

IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARONG KUBE-PKH DI KOTA SEMARANG

Yanthuridi, Turtiantoro

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan di kota Semarang menjadi latar belakang penelitian ini. Selain pula banyak ditemukan di beberapa daerah sampel selain kota Semarang, bahwa program e-Warong Kube-PKH tidak berjalan sesuai harapan. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana implementasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang? yang notabene termasuk kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di antara kota-kota lainnya di Jawa Tengah. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan munculnya berbagai kendala dalam implementasi program tersebut?. Tujuan penelitian untuk mendapatkan data/informasi terkait implementasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang. Selain itu, untuk menganalisis faktor yang menyebabkan munculnya berbagai kendala dalam implementasi program e-Warong Kube-PKH tersebut. Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai salah satu varian teori dalam studi mengenai kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun sampel dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang belum berjalan maksimal, dinilai belum efektif dan tidak tepat sasaran. Sehingga masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang. Disarankan Pemerintah Kota Semarang perlu mengoptimalkan sosialisasi dan pembimbingan bagi pendamping sosial, Kube Jasa, dan KPM terkait fungsi dan tujuan program e-Warong Kube-PKH. Pemerintah juga perlu segera menyelesaikan masalah double data dan data-data yang tidak tepat, serta regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan wewenang baik dalam pendataan warga miskin maupun dalam penyaluran bantuan sosial.

Kata Kunci : Kemiskinan, Implementasi, e-Warong Kube-PKH

ABSTRACT

Poverty in Semarang is the background of this research. Apart from Semarang, it was found in several sample areas, that the e-Warong Kube-PKH program did not go as expected. The question arises as to how the implementation of the e-Warong Kube-PKH program in Semarang? in fact, Semarang the city with the highest number of poor people in other cities in Central Java. Then what factors cause various obstacles to the implementation of the program?. The research to get data/information related to the implementation of the e-Warong Kube-PKH program in Semarang. And to analyze the factors that caused the emergence of various obstacles in the implementation of the e-Warong Kube-PKH program. To answer the problem and the purpose of the study using the theory of policy implementation as one of the variants of the theory in public policy studies. This research was conducted using qualitative methods with a descriptive analysis approach. The sample was selected using purposive sampling and snowball sampling. Based on the results of research, it can be concluded that the application of e-Warong Kube-PKH in Semarang is not running optimally, is considered ineffective and not on target. So it is still necessary to improve the quality of the e-Warong Kube-PKH program implemented by the elected in Semarang. Government of Semarang needs to improve socialization and assistance for social assistance, Kube Services, and KPM related to e-Warong Kube-PKH program and objectives. The government also needs to immediately resolve the problem of double data and inaccurate data, regulations and strict sanctions for perpetrators of abuse of authority, both in the data collection of the poor and in the distribution of social assistance.

Key Words: Poverty, Implementation, e-Warong Kube-PKH

PENDAHULUAN

E-Warong Kube-PKH merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sejak Juni 2016. Program ini sebagai respon Kemensos terhadap arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo pada April 2016 kepada jajaran menteri. Isi arahan tersebut diantaranya: 1) pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif; 2) penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan, serta mengurangi penyimpangan; dan 3) perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana

bansos menjadi satu kartu. Terkait hal ini, Menteri Sosial memberikan arahan pada jajaran di lingkup Kemensos bahwa 1) semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar outcome (keluaran)-nya memberikan dampak luas, efisien, dan efektif; 2) perlu dilakukan pemberdayaan pendamping PKH dan masyarakat yang menjadi dampungnya, dan menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif; dan 3) proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (Kube) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya.

Pada 2016, Kemensos merencanakan pembukaan 302 unit e-Warong Kube-PKH. Per 29 November 2016, Kemensos telah berhasil meresmikan 108 unit e-Warong Kube-PKH di 35 kota/kabupaten. Di Kota Semarang, program e-Warong Kube-PKH diluncurkan dan dibuka pada tanggal 20 Agustus 2016. Peluncuran program e-Warong Kube-PKH dimaksud sebagai tindak lanjut dari komitmen Kementerian Sosial dalam mengentaskan kemiskinan, termasuk di Kota Semarang.

Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh tim peneliti dari The SMERU Research Institute (2017), ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH. Penelitian yang dilakukan dengan mengambil sampel di 5 (lima) kabupaten/kota di Indonesia (Batam, Balikpapan, Denpasar, Kabupaten Kediri, Malang) tersebut, menunjukkan bahwa masih banyak kendala-kendala yang menghambat tercapainya tujuan program. Misalnya, di Denpasar, pembentukan Kube Jasa berlangsung secara instan sehingga para anggota tidak saling mengenal. Di Malang, Kube Jasa belum resmi terbentuk dan di Kediri,

KPM tidak mengetahui bahwa mereka telah ditunjuk sebagai anggota Kube Jasa. Sosialisasi e-Warong Kube-PKH pun belum mencakup semua pemangku kepentingan dan materinya pun kurang komprehensif. Bukan hanya itu saja, di beberapa daerah di Kediri, Batam, dan Denpasar, sebagian e-Warong Kube-PKH tutup setelah acara peresmian berlangsung. Berbagai hal tersebut menunjukkan, pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH masih menemui berbagai kendala sehingga menyebabkan program e-Warong Kube-PKH menjadi kurang optimal dalam mengentaskan kemiskinan.

Menurut berbagai sumber, pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang pun tidak luput dari berbagai masalah, misalnya, masih ada perbedaan data jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) antara Kemensos dengan Pemerintah Kota Semarang sehingga penyaluran manfaat tidak tepat sasaran (www.kemenkopmk.go.id), sosialisasi yang belum optimal, stokist barang yang kurang lancar, minimnya fasilitas penghitungan transaksi (www.tribunnews.com). Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang tidak akan optimal dalam mencapai tujuannya. Di lain sisi, Kota Semarang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 80.90 ribu jiwa (2017), dan menempati peringkat ke-1 jumlah penduduk miskin perkotaan di Jawa Tengah (jateng.bps.go.id). Sedangkan bila dibandingkan dengan total 98 kota di Indonesia, Kota Semarang menduduki peringkat ke-12 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia (www.bps.go.id). Jawa Tengah bila dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indoneisa, menduduki

peringkat ke-2 provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak setelah Jawa Barat, dengan jumlah penduduk miskin 6013.07 ribu jiwa (2017).

Melihat berbagai persoalan yang ada dalam pelaksanaan e-Warong Kube-PKH, baik di berbagai daerah lain maupun di Kota Semarang, serta berhadapan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Semarang, maka menjadi perlu bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang. Adapun kajian ini bertujuan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan program e-Warong Kube-PKH itu sendiri, kemudian menggali data/informasi terkait implementasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang, serta untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan munculnya berbagai kendala dalam implementasi program tersebut.

Program e-Warong Kube-PKH termasuk ke dalam kebijakan sosial yang dikeluarkan Pemerintah melalui Permensos Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Kebijakan Sosial menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, seperti dikutip oleh Suharto (2011), menunjuk pada apa yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan perogram-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah

sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi developmental) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Dalam hal ini, kebijakan sosial dikeluarkan sebagai respon dari kemiskinan yang ada demi tercapainya kesejahteraan sosial.

Dalam menguraikan data/informasi terkait pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH serta berbagai faktor yang menjadi kendala, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan model Edward III. Edward seperti dikutip oleh Winarno, mengembangkan suatu implementasi kebijakan dengan mengajukan buah pertanyaan, yakni: prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edward berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan implementasi kebijakan publik. Edward melakukan identifikasi empat faktor atau variabel kritis yang dianggap dapat memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap Implementor, dan Struktur Birokrasi (Wahab, 2004: 65). Keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi mempengaruhi sumber daya, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi, yang pada gilirannya memengaruhi implementasi.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan keadaan proses pelaksanaan kebijakan program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang secara mendalam. Penelitian ini dilakukan di Kota

Semarang dengan subjek penelitiannya yaitu Dinas Sosial Kota Semarang, Pendamping sosial (PKH, TKSK), Kube Jasa, BNI Kota Semarang, dan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka atau hanya sedikit bersifat monografis sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi. Analisis dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi secara logis. Adapun tahapan analisis data meliputi: pengumpulan seluruh data, reduksi data, penyajian data (*display data*), dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya program e-Warong Kube-PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Kube Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial (Permensos Nomor 25 Tahun 2016). Di Kota Semarang sendiri, e-Warong Kube-PKH telah mencapai jumlah 60 e-Warong Kube-PKH sejak acara peluncuran tanggal 20 Agustus 2016, di Kelurahan Ngadirejo, Mijen.

Dapat dikatakan bahwa, Pemerintah Kota Semarang memberi respon positif dan antusias dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program e-Warong

Kube-PKH. Meskipun, dalam pelaksanaannya masih terlihat belum maksimal dan tidak tepat sasaran. Adapun yang terlibat dalam implementasi program tersebut ialah Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kota Semarang, BNI Kanwil Semarang (BNI Cabang Semarang, BNI Cabang Karangayu, BNI Cabang Undip), Bulog dan distributor lain, Pendamping Sosial seperti Unit Pelaksana PKH (Program Keluarga Harapan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), TPFM (Tim Penjangkauan Fakir Miskin), dan Kube Jasa.

BNI Kanwil Semarang membagi tugas kepada tiga kantor cabang berdasarkan wilayah untuk mengurus masing-masing kecamatan. 1) BNI Cabang Semarang mengurus diantaranya KPM di wilayah kecamatan Banyumanik, Candisari, Genuk, Gunungpati, Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Utara; 2) BNI Cabang Karangayu mengurus KPM di wilayah kecamatan Gajahmungkur, Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, dan Tugu; dan 3) BNI Cabang Undip mengurus KPM di wilayah kecamatan Gayamsari, Pedurungan, Semarang Selatan, dan Tembalang.

Sebagai sasaran kebijakan ialah Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (penerima bantuan sosial peserta program keluarga harapan, penerima bantuan pangan non-tunai), penerima bantuan subsidi gas elpiji, penerima bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan anggota kelompok Kube, serta masyarakat sekitar (untuk melayani pembayaran telephone, listrik, air, dll). Namun, di Kota Semarang, sasaran e-Warong Kube-PKH lebih kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), orang yang kurang mampu dan orang miskin yang sudah tercatat

di Basis Data Terpadu. Sedangkan pemanfaatan untuk masyarakat umum belum maksimal dilakukan.

Sebagai kebijakan sosial, program e-Warong Kube-PKH memiliki fungsi pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pengembangan (*developmental*). Pertama, program e-Warong Kube-PKH dapat mencegah semakin bertambahnya jumlah angka kemiskinan, mencegah munculnya penyakit sosial lain seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Kedua, program e-Warong Kube-PKH diharapkan mampu menyembuhkan penyakit kemiskinan yang diderita oleh masyarakat miskin selama bertahun-tahun. Ketiga, program e-Warong Kube-PKH, apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, akan mampu untuk mengembangkan pola pikir masyarakat miskin dalam berusaha. Sehingga prinsip *sustainable development* dapat direalisasikan.

Secara teoritis, dengan asumsi bahwa kemiskinan di Kota Semarang termasuk kategori kemiskinan absolut, maka dengan program e-Warong Kube-PKH ini, kemiskinan di Kota Semarang dapat diatasi. Sehingga kesejahteraan bagi masyarakat miskin di masa depan dapat terlihat. Tentunya hal ini dapat terwujud apabila didukung dengan pelaksanaan program yang tepat. Oleh sebab itu, selanjutnya dalam Pembahasan, akan penulis sampaikan analisis terkait implemenasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang serta kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah maupun akademisi.

PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang berdasarkan Teori Edward III

1. Komunikasi

a. Implementor dan Sasaran Kebijakan

Dalam mengimplementasikan program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang, Dinas Sosial bekerja sama dengan BNI, Pendamping Sosial (Unit Pelaksana PKH, TKSK, TPFM), Kube Jasa, dan Bulog sebagai distributor. Akan tetapi, kerja sama dengan Bulog dihentikan mulai tahun 2018. Hal ini dikarenakan Unit Pelaksana PKH maupun KPM kecewa dengan beras yang berasal dari Bulog. Sehingga pendamping sosial maupun Kube Jasa lebih memilih membeli beras dari distributor lain yang lebih terpercaya. Selain itu, bila dilihat, yang paling berperan dalam pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH mulai dari pembentukan sampai pendampingan ialah Unit Pelaksana PKH. Hal ini terlihat dari berbagai informasi mengenai pelaksanaan mendetail program lebih banyak didapatkan dari Unit Pelaksana PKH. Adapun Unit Pelaksana PKH membina 58 e-Warong Kube-PKH sedangkan dua sisanya merupakan binaan TKSK yaitu e-Warong Kube-PKH di kecamatan Semarang dan Temabalang. TPFM hanya mendampingi KPM.

Pada dasarnya, sasaran program e-Warong Kube-PKH adalah penerima bantuan sosial dan masyarakat umum. Akan tetapi di Kota Semarang, sejauh pengamatan yang penulis lakukan, sasaran program lebih cenderung kepada penerima bantuan sosial, khususnya penerima bantuan PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), ini menunjukkan bahwa program e-Warong

Kube-PKH belum dimanfaatkan dengan maksimal. Karena cenderung hanya fokus pada pencairan bantuan sosial non tunai.

b. Sosialisasi Program

1) Metode yang digunakan

Pertama, Sosialisasi program e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang pertama kali dilakukan oleh Dinas Sosial pada tahun 2017 dengan metode seminar di aula Hotel Gracia. Metode seperti ini kurang efektif, karena kesempatan tanya jawab sangat terbatas sedangkan peserta yang hadir cukup banyak yaitu sekitar 640 orang. Kedua, sosialisasi dilakukan oleh Unit Pelaksana PKH melalui pertemuan rutin setiap bulan bersama KPM PKH yang menjadi pengurus Kube Jasa. Pertemuan intens seperti ini lebih efektif bila dibandingkan dengan seminar.

2) Intensitas Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan antar Dinas Sosial dengan Unit Pelaksana PKH tergolong intens, melihat letak kantor yang berdekatan dalam satu gedung. Selain itu, komunikasi juga intens dilakukan dalam grup WA (Watsapp) yang dibuat oleh Dinas Sosial, sehingga memudahkan antar pihak yang terlibat dalam melakukan proses sharing dan tanya jawab terkait pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH. Lebih daripada itu, komunikasi juga dilakukan melalui sidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Bidang Penanganan Fakir Miskin) kepada Kube Jasa dan KPM yang mengalami kendala pencairan bantuan sosial.

Komunikasi formal yang dilakukan melalui seminar didukung komunikasi informal melalui grup WA, pertemuan rutin, dan sidak langsung ke lapangan tentu sangat membantu dalam kelancaran penyampaian arus informasi terkait pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH. Sehingga, berbagai kendala di lapangan dapat diatasi dengan lebih cepat. Namun, yang perlu diperhatikan ialah isi dari informasi yang disampaikan perlu lebih mendetail dan memahamkan bahwa fungsi e-Warong Kube-PKH tidak sekedar sebagai tempat pencairan bantuan sosial saja akan tetapi masih banyak fungsi lain seperti sebagai tempat pemasaran hasil Kube dan tempat layanan koperasi simpan pinjam. Sehingga pemanfaatan e-Warong Kube-PKH dapat lebih maksimal.

2. Sumber Daya

a. Kemampuan Implementor

1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas implementor. Misalnya, pegawai Dinas Sosial khususnya bidang PFM (Penanganan Fakir Miskin) semuanya merupakan lulusan sarjana atau di atasnya (selain juga berpengalaman) sehingga kualitas dalam bekerja lebih baik. Lain halnya dengan Kube Jasa yang rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai setingkat SD (Sekolah Dasar).

2) Tingkat Pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program

Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran serta aplikasi detail program. Di lapangan masih banyak ditemukan pemahaman yang kurang baik dari Kube Jasa terhadap tujuan dan sasaran program. Selain pula dipengaruhi oleh kurangnya informasi.

3) Kemampuan menyampaikan program dan mengarahkan

Dalam rapat koordinasi tanggal 23 Mei 2018 di Dinas Sosial It.2, Primasari Y.S. (Kabid PFM), menyampaikan bahwa kualitas pendamping sosial masih kurang dalam melakukan tugas sosialisasi, pendampingan, pengecekan, dan penjangkauan KPM. Selain disebabkan oleh kualitas individu, juga disebabkan oleh tidak imbangnya jumlah pendamping sosial dengan KPM yang harus didampingi. Menurut Rissa Soraya (Koordinator TKSK), di lapangan ada pendamping sosial yang bahkan harus menangani 4000 KPM. Kurangnya SDM ini menyebabkan tidak semua KPM dapat dijangkau dan informasi tidak tersampaikan seluruhnya.

b. Ketersediaan Dana

1) Berapa dana yang dialokasikan

Program e-Warong Kube-PKH menghabiskan dana APBN sebesar Rp 30.000.000,- dengan rincian Rp 10.000.000,- untuk rehabilitasi warung, pembelian rak, pembelian etalase dan sarana/prasarana pendukung lain, sedangkan Rp 20.000.000,- untuk modal usaha (25%) dan modal kerja (75%).

- 2) Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi program/kebijakan

Dari dana yang tersedia, menurut Aldo Fitra Romansyah (Ketua Unit Pelaksana PKH), masih kurang untuk dana pembangunan fisik e-Warong Kube-PKH nya. Menurutnya, harga bahan bangunan di Kota Semarang agak mahal sehingga membutuhkan lebih dari Rp 10.000.000,- yaitu sekitar Rp 15.000.000,- untuk pembangunan.

3. Disposisi

a. Karakter Pelaksana

1) Tingkat komitmen

Komitmen pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program e-Warong Kube-PKH dapat dibilang sangat baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang hingga mencapai jumlah 60 e-Warong Kube-PKH. Selain pula, pemerintah kota Semarang sangat aktif mencari informasi terkait bagaimana pelaksanaan program ke Kementerian Sosial. Hanya, komitmen ini belum terlihat maksimal bila melihat telatnya laporan-laporan yang dikumpulkan oleh beberapa pendamping sosial. Selain itu, komitmen Bulog untuk menyediakan beras yang layak juga masih kurang, sehingga menyebabkan Bulog tidak lagi dipercaya sebagai distributor beras untuk e-Warong Kube-PKH di Kota Semarang.

2) Tingkat demokratisasi

Berdasarkan intensitas komunikasi formal maupun informal yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Unit Pelaksana PKH dengan kelompok sasaran maupun mitra program, dapat dikatakan bahwa tingkat demokratisasi implementor dalam melaksanakan program e-Warong Kube-PKH sudah cukup baik. Apalagi Dinas Sosial maupun Unit Pelaksana PKH juga menerima dengan baik apabila ada KPM yang datang langsung ke kantor untuk sekedar bertanya dan sharing kendala-kendala di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

a. Ketersediaan SOP yang Mudah Dipahami

Tersedianya SOP yang mudah dipahami membantu suksesnya pelaksanaan program kebijakan. Saat ini, telah tersedia berbagai buku petunjuk pelaksanaan program e-Warong Kube-PKH maupun petunjuk teknis Bantuan Pangan Non Tunai sehingga memudahkan Dinas Sosial maupun Unit Pelaksana PKH dalam melakukan tugasnya dan mengkoordinasi mitra program. Kemudian tersedianya SOP cara mendapatkan KKS, Tata Cara Pelaporan BPNT, dan langkah-langkah Pencairan BPNT juga memudahkan KPM untuk mendapatkan BPNT.

b. Struktur Birokrasi

Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana mempengaruhi implementasi program kebijakan. Semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis, dan lambat untuk merespon perkembangan program. Hal ini terlihat pula dari jarak yang jauh antar

Kemensos sebagai penancang program dengan KPM sebagai sasaran program dapat mengakibatkan respon perkembangan program menjadi rumit dan lama. Terutama dalam hal mengatasi berbagai kendala. Untungnya, pemerintah memanfaatkan media elektronik seperti ketika ada laporan atau pertanyaan terkait kendala dapat langsung SMS dan kirim komentar ke www.lapor.go.id, sehingga mempercepat arus penyampaian informasi.

Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala

Dalam pelaksanaannya di Kota Semarang, program e-Warong Kube-PKH tidak luput dari berbagai kendala yang menyebabkan implementasinya jadi kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Adapun berbagai kendala tersebut ialah:

- 1) Kurangnya informasi dari Pemerintah Pusat di awal pelaksanaan program;
- 2) Adanya *double data* warga miskin kota Semarang (perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah);
- 3) Masih adanya data yang tidak tepat (masyarakat yang sudah mampu masih terdaftar sebagai warga miskin);
- 4) Sarana dan prasarana yang masih kurang;
- 5) Sumber daya manusia (kurangnya kualitas dan kuantitas pendamping sosial);
- 6) Anggaran yang kurang maksimal;
- 7) Kendala teknis (saldo kosong, Pin lupa, Kartu hilang, dll);
- 8) Terjadi konflik antar e-Warong Kube-PKH dengan Agen 46 binaan BNI.

PENUTUP

SIMPULAN

Bila dilihat dari bentuk programnya, e-Warong Kube-PKH hanya bersifat sebagai suplemen bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia. Dampak program diharapkan mampu untuk meminimalisir terjadinya tindak korupsi bantuan sosial, mengenalkan modernisasi kepada masyarakat miskin, dan mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan. Adapun implementasi program e-Warong Kube-PKH bila dilihat dari beberapa variabel sesuai dengan teori Edward III ialah sebagai berikut:

1. Dari segi komunikasi, metode yang digunakan ialah formal dan informal. Komunikasi informal via grup WA sangat membantu dalam tukar info terutama terkait kendala dan penanganannya. Intensitas komunikasi yang dilakukan cukup baik, hanya saja kurang dalam hal penyampaian fungsi dan manfaat detail program e-Warong Kube-PKH.
2. Dari segi sumber daya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara umum masih kurang memadai, terutama pendamping sosial. Ketersediaan dana untuk pelaksanaan program juga masih belum maksimal.
3. Dari segi disposisi, secara umum, komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program e-Warong Kube-PKH sudah cukup baik. Akan tetapi komitmen mitra program sebagai pendukung masih perlu ditingkatkan. Terkait tingkat demokratisasi sudah cukup baik.
4. Dari segi struktur birokrasi, meskipun struktur organisasi pelaksanaan program terkesan rumit dan birokratis, pada kenyataannya hal ini dapat diatasi dengan komitmen Dinas Sosial dan Pendamping untuk terjun langsung

ke lapangan ketika ada permasalahan. Selain itu, tersedianya SOP sangat memudahkan pelaksana program maupun KPM dalam melakukan perannya.

5. Secara umum, implementasi program e-Warong Kube-PKH tidak terlepas dari berbagai kendala yang menyebabkan pemanfaatan fungsi e-Warong Kube-PKH menjadi tidak maksimal, dinilai belum efektif dan tidak tepat sasaran.

SARAN

1. Sosialisasi terkait tujuan, manfaat, dan fungsi program e-Warong Kube-PKH perlu disampaikan lebih mendetail dari pendamping sosial ke Kube Jasa dan KPM.
2. Perlu pembinaan lebih intensif terhadap Kube Jasa agar mampu meningkatkan kapasitas dan efektifitas Kube Jasa.
3. Perlu pembimbingan dan pelatihan bagi pendamping sosial untuk meningkatkan kualitas pemahaman, komitmen, dan skill dalam melakukan tugasnya.
4. Penyelesaian masalah *double data* dan data-data yang tidak tepat harus konsisten dilakukan.
5. Perlu ada regulasi yang jelas dari Kemensos terkait sanksi terhadap penggunaan KKS yang tidak sesuai aturan.
6. Semua pemangku kepentingan perlu mendapat kejelasan tentang fungsi e-Warong Kube-PKH dan mekanismenya sebagai titik distribusi bansos nontunai, agen bank, sekaligus komponen penghidupan masyarakat miskin.

Sehingga program e-Warong Kube-PKH dapat menjadi program pengentasan kemiskinan yang memiliki dampak berlanjutan (*sustainable development*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ali, Faried, Andi Syamsu Alam, Sastro M. Wantu. (2012). *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamidi, Jazim. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kota Semarang Dalam Angka 2017*. BPS Kota Semarang.
- Lexy J, Moleong. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulkhan, Abdul Munir. (1994). *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam*. Yogyakarta: SIPRESS.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhadi. (2007). *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Petunjuk Pelaksanaan e-Warong KUBE Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Putra, Fadillah. (2003). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. (1982). *Bureaucracy and Policy Implementation*. Homewood, Illinois: The Dorsey Press.

- Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2016-2021*. Dinas Sosial Kota Semarang.
- Soekanto, Suryono. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A.G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2011). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Swistantoro. (2014). *Pembasmian Kemiskinan: Perspektif Sosiologi-Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: YPAPI.
- Tim Penyusun. (2017). *Petunjuk Teknis Penanganan Fakir Miskin di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung Kube-PKH)*. Kementerian Sosial RI.
- Tim Permata Press. (2011). *UUD 1945 Amandemen I,II,III & IV UUDRIS & UUDS*. Permata press.
- Triwulan, Titik. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisa Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal dan Laporan Penelitian:

- M. Sulton Mawardi, Ruhmaniyati, Tamyis, A.R., Usman, S., Kurniawan A., Budiani. (2017). *Kajian Awal Pelaksanaan Program e-Warung Kube-*

PKH. Jakarta, Indonesia: The SMERU Research Institute bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Internet :

Bantuan Langsung Tunai, <https://id.wikipedia.org/>, diakses tanggal 18 Desember 2018 Pukul 18.20 wib.

Data Warga Miskin Kemensos dan Pemkot Semarang Berbeda, E-Warung Belum Tepat Sasaran, beritajateng.net, diakses tanggal 26 Februari 2018 Pukul 20.55 wib.

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017, www.bps.go.id, diakses tanggal 25 Februari 2018.

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 1996-2017, jateng.bps.go.id, diakses tanggal 25 Februari 2018.

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2017, www.bps.go.id, diakses tanggal 25 Februari 2018.

Kemenko PMK Paparkan Kebijakan Program Kebijakan Subsidi Rastra dan BPNT untuk Prov Jatim, www.kemenkopmk.go.id, diakses tanggal 18 Desember 2018 Pukul 20.10 wib.

Kube Kelompok Usaha Bersama sebagai Model untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, <https://inspirasitabloid.wordpress.com/>, diakses tanggal 18 Desember 2018 Pukul 18.35 wib.

Launching E-Warung oleh Mensos di Kota Semarang, dinsos.jatengprov.go.id, diakses tanggal 25 Februari 2018 Pukul 17.02 wib.

Malang Menjadi Kota Pertama yang Menerapkan E-Warung, www.e-warung.com, diakses tanggal 25 Februari 2018 Pukul 16.18 wib.

Menteri Sosial Ubah Nama Raskin Menjadi Rastra, <https://regional.kompas.com/>, diakses tanggal 18 Desember 2018 Pukul 19.58 wib.

Program E-Warung Bisa Bantu Rakyat Miskin, www.tribunnews.com, diakses tanggal 26 februari 2018 Pukul 21.15 wib.

Program Keluarga Harapan, www.kemsos.go.id, diakses tanggal 18 Desember 2018 Pukul 18.28 wib.

Rakor Hasil Peninjauan Langsung Pelaksanaan BPNT Kota Semarang, www.kemenkopmk.go.id, diakses tanggal 26 Februari 2018 Pukul 20.05 wib.

Raskin, <https://id.wikipedia.org/>, diakses tanggal 18 Desember 2018 Pukul 19.56 wib.